



Personnel Management of Village Officials Through SIMPEG Application in Realizing Village SDGs in Kendal Village, Sekaran District, Lamongan Regency

Pengelolaan Kepegawaian Aparatur Desa Melalui Aplikasi SIMPEG Dalam Mewujudkan SDGs Desa di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan

Noviyanti*, Prasetyo Isbandono, Dian Arlupi Utami, Haryo Kunto Wibisono, Weni Rosdiana

Universitas Negeri Surabaya

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the personnel management of village officials by developing SIMPEG application to realize Sustainable Development Goals (SDGs) of village in Kendal Village, Sekaran District, Lamongan Regency. The type of research is research dan development (R&D) method by using prototype model that consists of 3 steps, which are: listen to customer, build/revise mock-up, and customer test drives mock-up. The techniques of data collection are literature study, deep interview, observation, and documentation. The results show that the personnel management using SIMPEG application has realized the 17th SDGs of village partnership for rural development through management and integration of information and communication technology (ICT). The development of Village SIMPEG application also is one of the efforts to realize the principles of electronic government and orderly personnel administration. However, this application still needs development by providing upload button to upload files related to several SIMPEG menu.

Keywords: Personnel Management, SIMPEG, SDGs of village

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen kepegawaian perangkat desa dengan mengembangkan aplikasi SIMPEG untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode *research* dan *development* (R&D) dengan menggunakan model *prototype* yang terdiri dari 3 langkah, yaitu: *listening to customer*, *build/revise mock-up*, dan *customer test drive mock-up*. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kepegawaian dengan aplikasi SIMPEG telah mewujudkan SDGs Desa ke-17 kemitraan untuk pembangunan desa melalui pengelolaan dan integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pengembangan aplikasi SIMPEG Desa juga merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip elektronik pemerintahan dan tertib administrasi kepegawaian. Namun aplikasi ini masih perlu dikembangkan dengan menyediakan tombol upload untuk mengupload file terkait beberapa menu di SIMPEG.

Keywords: manajemen personalia, SIMPEG, SDGs desa

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)

ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Hasniati

Reviewed by:

Gede Sandiasa and Lely Indah

Mindarti

*Correspondence:

Noviyanti

noviyanti@unesa.ac.id

Published: 29 April 2022

Citation:

Noviyanti et.al (2022). *Personnel Management of Village Officials Through SIMPEG Application in Realizing Village SDGs in Kendal Village, Sekaran District, Lamongan Regency.*

JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik). 10:1

doi: 10.21070/jkmp.v10i1.1686

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat saat ini adalah salah satu bentuk nyata revolusi industri 4.0. Berbagai individu dan organisasi baik swasta maupun publik berlomba-lomba memanfaatkan teknologi dalam menjalankan berbagai kegiatannya. Pemerintah juga menghadapi tantangan dan dinamika organisasi yang menuntutnya untuk mampu berkembang dalam menghadapi dinamika organisasi yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah dituntut untuk melakukan manajemen inovasi yang mencakup berbagai dimensi dan bidang aplikasi terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam segala aspek kelembagaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada (Gupta, 2018).

Salah satu kegiatan penyelenggaraan pemerintah adalah pengelolaan kepegawaian di organisasi publik baik pusat maupun daerah. Sumber daya aparatur merupakan aset penting bagi organisasi sehingga pengelolaan data riwayat pegawai penanganan secara khusus. Pengelolaan data pegawai, membutuhkan manajemen sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola data pegawai tersebut. Hasibuan (2019) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Inovasi dalam manajemen sumber daya aparatur merupakan salah satu aspek kelembagaan yang perlu segera dilakukan melalui pemanfaatan teknologi. Inovasi merupakan perilaku yang mengalami perubahan (Suwarno, 2013) yang berpotensi untuk menyuguhkan banyak manfaat termasuk untuk memudahkan akses menuju informasi publik, membuat partisipasi warga yang lebih besar dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, mengefektifkan biaya, daya tanggap, dan akuntabilitas (Kim, 2008).

Pengelolaan data kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi dan informasi merupakan salah satu perwujudan *electronic government (E-government)*. *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya (Indrajit, 2016). Pemanfaatan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru. Penelitian ini membentuk hubungan baru, yaitu terbentuknya pengelolaan kepegawaian yang disebut G2E (*Government to Employees*).

Penerapan *e-government* dengan melakukan inovasi pada manajemen sumber daya aparatur dapat membangun aparatur negara, baik pusat maupun daerah. Sehingga mampu mencapai tugas, fungsi, dan peranannya secara efektif dan efisien. Adapun dasar pengelolaan sumber daya aparatur negara adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Inovasi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dalam manajemen pegawai melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2000, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpulan, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak. Sedangkan perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Rivai (2016) bahwa SIMPEG didefinisikan sebagai prosedur sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menarik, serta melakukan validasi data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi terkait sumber daya manusia, aktivitas-aktivitas personalia, dan karakteristik-karakteristik organisasi. Dengan demikian, SIMPEG diharapkan menjadi sebuah totalitas terpadu yang terdiri atas perangkat lunak, perangkat penyimpanan yang meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, bergantung, dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian (Djawa & Puspasari, 2015). Penerapan SIMPEG di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2000 bahwa semua pemerintah daerah sudah harus menerapkan proses pengelolaan data berbasis komputer. Tujuannya agar pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian, yang meliputi: perencanaan, penganggaran pengadaan, mutasi, pensiun, pengelolaan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK), kenaikan pangkat, golongan, gaji, dan absensi.

Pengelolaan data kepegawaian berbasis komputer tidak hanya sampai pada pemerintah daerah namun diharapkan sudah dapat diterapkan hingga pada tingkat terkecil yakni pemerintahan desa. Urgensi peningkatan pelayanan di tingkat desa tertuang pada Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan SDGs Desa. *Sustainable Development Goals* Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan di tingkat desa yang mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu prioritas penggunaan dana desa 2021 dalam pencapaian SDGs Desa adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan kewenangan desa.

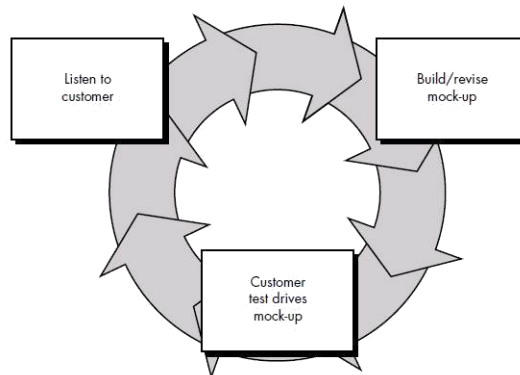
Pada penelitian ini, pengelolaan data pegawai di kantor desa melalui aplikasi SIMPEG merupakan salah satu bentuk perwujudan SDGs Desa. Sebagai unit terkecil dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara Indonesia, aparat pemerintah desa (perangkat desa) harus memiliki pengetahuan dan kemampuan menata berbagai informasi pegawainya dalam rangka manajemen informasi kepegawaian yang sesuai dengan kebijakan kepegawaian. Akan tetapi, hingga saat ini masih banyak pemerintah desa yang belum memiliki SIMPEG dalam mengelola sumber daya aparturnya, salah satunya adalah Pemerintah Desa Kendal, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan hasil observasi, Kantor Desa Kendal belum memiliki aplikasi SIMPEG dalam mengelola informasi kepegawaian aparatur desanya. Selama ini pelayanan administrasi di Kantor Desa Kendal sudah cukup baik karena terdapat aparat desa untuk melakukan pelayanan tersebut. Penulis menemukan bahwa untuk manajemen kepegawaian masih kurang. Hal ini dikarenakan terdapat data individu pegawai yang belum lengkap riwayatnya. Selain itu, sistem kepegawaian masih menggunakan sistem manual dengan cara pengetikan dan terdapat pula data yang belum *update* sehingga masih membutuhkan waktu yang tidak sebentar ketika membutuhkan informasi pegawai yang terbaru. Pengetahuan dan pengelolaan informasi kepegawaian perangkat Desa Kendal masih kurang dan terbatas sehingga informasi kepegawaian menjadi tidak begitu penting. Hal ini terlihat dari belum memanfaatkan teknologi secara optimal dalam penyimpanan data aparatur desa. Kepala desa juga masih merasa kebingungan untuk mengecek kembali data pegawai. Kegiatan administrasi kepegawaian tersebut akan berpengaruh pada keadaan data perorangan pegawai maupun secara keseluruhan. Hal ini juga menyebabkan lamanya pekerjaan dan bahkan dapat menunda pekerjaan yang lain. Padahal, manajemen informasi kepegawaian yang baik oleh perangkat desa akan mewujudkan kemandirian perangkat desa dalam menggerakkan roda pemerintahan di tingkat desa sehingga perangkat desa dapat menjalankan berbagai programnya dan bekerja sama dengan warganya.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas penerapan aplikasi SIMPEG yang telah dirancang oleh penulis dalam rangka pengelolaan kepegawaian di Kantor Desa guna mewujudkan SDGs Desa. Tujuan penelitian ini tersedianya aplikasi SIMPEG berbasis visual studio guna meningkatkan kinerja dalam pengelolaan data kepegawaian secara komputerisasi di Kantor Desa Kendal, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode R&D (*Research dan Development*). Metode ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji efektivitas produk tersebut, sehingga dapat berfungsi di masyarakat luas. Lokasi penelitian ini berada di Desa Kendal, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Pada penelitian ini, pengembangan aplikasi SIMPEG Desa menggunakan model prototipe agar semua proses pengembangan sistem dapat terstruktur dan dilaksanakan dengan baik. Tiga tahapan tersebut, antara lain: pengumpulan kebutuhan, perancangan dan evaluasi prototipe. Ketiga tahapan tersebut akan dapat diilustrasikan seperti gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Ilustrasi Model Prototype (Sukamto & Shalahuddin, 2015)

- a. Pengumpulan Kebutuhan. Tahapan ini dilakukan secara intensif untuk menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui dan gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan, menspesifikasikan *Location Based Service* agar dapat diterapkan dan sesuai kebutuhan *user* (aparatur Desa Kendal).
- b. Perancangan. Perancangan sistem adalah proses multi tujuan yang berfokus pada desain pembuatan aplikasi SIMPEG Desa termasuk struktur data, dan representasi *desain interface*. Hasil dari perancangan ini yaitu prototipe program aplikasi SIMPEG desa.
- c. Evaluasi Prototype. Pada tahap ini, *user* (aparatur Desa Kendal) mengevaluasi aplikasi SIMPEG desa dari segi fungsional *user acceptance*.

Hasil akhir penelitian ini akan menghasilkan aplikasi SIMPEG yang akan digunakan di Kantor Desa Kendal, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Sumber data diperoleh dengan tiga teknik pengumpulan data, antara lain: studi literatur, wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Kebutuhan

Pada tahap ini dilaksanakan dengan observasi ke kantor Desa Kendal yang bertujuan memetakan akar masalah dan kebutuhan *user* (aparatur pemerintah desa) terkait dengan pengelolaan informasi kepegawaian di tingkat desa yang menjadi rangkaian perwujudan SDGs Desa. *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan di tingkat desa sesuai dengan program prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021.

Berdasarkan Permendes No 13 Tahun 2020, terdapat 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa. Mengingat saat ini masih dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19, dana desa dikhususkan untuk mencapai 10 SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa. Salah satu poinnya adalah kemitraan untuk pembangunan desa. Melalui kemitraan untuk pembangunan desa, diharapkan semua sektor di desa perlu diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan untuk menciptakan inovasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan perwakilan aparatur Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, diketahui bahwa selama ini belum ada pendataan mengenai informasi kepegawaian di kantor desa. Hal ini dikarenakan status semua aparatur Desa Kendal non PNS (Pegawai Negeri Sipil). Penulis juga menemukan bahwa kesadaran aparatur desa tentang pentingnya informasi kepegawaian masih rendah.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perancangan aplikasi SIMPEG. SIMPEG didefinisikan sebagai prosedur sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menarik, serta melakukan validasi data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi terkait sumber daya manusia, aktivitas-aktivitas personalia, dan karakteristik-karakteristik organisasi. Rancangan aplikasi SIMPEG ini kemudian akan disosialisasikan kepada aparatur desa sehingga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan data kepegawaian di tingkat desa guna mewujudkan kemandirian desa dalam rangka *electronic government*.

Perancangan

Location based service pada penelitian ini adalah data kepegawaian yang akan dikelola di tingkat desa. Total aparatur pemerintah Desa Kendal sebanyak 8 orang. Hasil identifikasi di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan informasi kepegawaian akan dilaksanakan oleh Sekretaris Desa (Bapak Andi Syamsu Umar) yang dibantu oleh kepala urusan umum dan perencanaan (Bapak Marjoko), serta diawasi oleh Kepala Desa (Bapak Rois Purwo Nugroho, ST).

Berdasarkan hasil identifikasi kemampuan dan keterampilan aparatur desa di bidang teknologi dan informasi, menunjukkan bahwa semua aparatur desa adalah orang yang "melek" teknologi sehingga mereka sangat terbuka dengan inovasi yang ditawarkan oleh penulis. Walaupun status kepegawaian di kantor desa bukan pegawai non PNS, namun para pegawai menerima apabila rancangan aplikasi SIMPEG yang ditawarkan mengikuti aturan kepegawaian PNS seperti aplikasi SIMPEG yang dikelola Badan Kepegawaian Negara, yakni MySAPK. Hal ini mengingat bahwa kedepannya status aparatur Desa dapat menjadi PNS apabila lulus dan diangkat sesuai prosedur yang berlaku.

Kegiatan perancangan aplikasi dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari tanggal 21 Juni hingga 20 Agustus. Perancangan aplikasi SIMPEG dilakukan oleh tim PKM yang terdiri dari 5 dosen prodi dan dibantu 4 mahasiswa. Rancangan aplikasi SIMPEG merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data pegawai aparatur Desa Kendal. Tujuan perancangan aplikasi ini untuk mempermudah aparatur Desa Kendal dalam mengelola data pegawainya. Adapun persyaratan yang harus dilakukan sebelum memulai aplikasi ini adalah melakukan instalasi visual studio dan membuat *database* baru di *SQL management server database microsoft* pada gadget Komputer dan Laptop, dengan spesifikasi minimum processor Quad Core, RAM 4GB, dan Hardisk minimal 120 GB. Jika sudah memenuhi persyaratan, aplikasi akan siap digunakan. Beberapa menu aplikasi SIMPEG mengikuti aplikasi SIMPEG BKN yaitu MySAPK, antara lain: data pribadi pegawai, data pendidikan, data keluarga, golongan, riwayat diklat, riwayat penghargaan. Berikut ini adalah rancangan aplikasi SIMPEG bagi aparatur Desa Kendal.

1. User Interface Menu Login

Ketika aplikasi diklik akan menampilkan *form login*. Untuk *login* ke menu utama aplikasi ini, pengguna *interface* harus memasukkan *username* dan *password*, dan meng-klik tombol *login* (Gambar 2). Jika pengguna *interface* salah memasukkan *username* dan/atau *password* maka tidak bisa login.

Gambar 2. User Interface Menu Login

2. User Interface Menu Utama

Tampilan menu utama pada aplikasi SIMPEG terdiri dari menu Form Pegawai, menu Form Pendidikan, menu Form Keluarga, menu Form Golongan, menu Form Riwayat Diklat, menu Form Riwayat Penghargaan, serta *button logout* (Gambar 3). Ketika pengguna interface memilih salah satu menu, maka isian tampilan sesuai dengan menu tersebut. Jika pengguna *interface* memilih *button logout* maka akan keluar aplikasi.



Gambar 3. User Interface Menu Utama

3. User Interface Menu Form Pegawai

Tampilan form pegawai berisikan beberapa kriteria input data untuk mengelola data pribadi aparatur Desa Kendal, seperti: No, NIP Baru, NIK, Nama, Gelar Depan, Gelar Belakang, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, No HP, No NPWP, Alamat, No BPJS, Nama Jabatan, dan TMT Jabatan (Gambar 4). Pada User Interface Form Pegawai terdapat beberapa *button*, antara lain:

- 1) *Input Data* untuk menginput data ketika selesai diketik dalam kolom *Textbox*
- 2) *Update Data* untuk merubah data yang akan diganti
- 3) *Delete Data* untuk menghapus data yang tidak digunakan
- 4) *Clear* untuk merubah data typo yang diketikkan dalam kolom *Textbox*
- 5) *Display Data* untuk menampilkan Inputan Data pada Kolom *Gridview* bawah berwarna biru
- 6) *Search* untuk mencari data yang akan dicari.

Ketika pengguna *interface* ingin kembali ke menu utama maka harus menekan *button Back*.

No	Nip_baru	Nik	Nama	Gelar_depan	Gelar_belakang	Jenis_kelamin	Tempat_lahir	Tanggal_lahir
1	1221314	7654321	Suparjo Lugus	S.AP	M.AP	Pria	Lamongan	12/06/1987

Gambar 4. User Interface Menu Form Pegawai

4. User Interface Menu Form Pendidikan

Form pendidikan berisikan beberapa kriteria Input Data untuk mengelola data pendidikan aparatur Desa Kendal, seperti: No, Tingkat Pendidikan, Nama Program, Tahun Lulus, Tanggal Lulus, Nomor Ijazah, dan Nama Sekolah (Gambar 5). Pada User Interface Form Pendidikan terdapat beberapa button, antara lain: *input data*, *delete data*, *clear*, *display data*, dan *search*.

No	Tingkat_pendidikan	Nama_program	Tahun_lulus	Tanggal_lulus	Nomor_ijazah	Nama_sekolah
1	Sarjana	Teknik Informatika	2015	12 Oktober 2015	1231314	124141241

Gambar 5. User Interface Menu Form Pegawai

5. User Interface Menu Form Keluarga

Tampilan Form Keluarga terdapat beberapa kriteria input data untuk mengelola data keluarga aparatur desa kendal, antara lain: No, Nama Ayah, Tempat Lahir Ayah, Tanggal Lahir Ayah, Nama Ibu, Tempat Lahir Ibu, dan Tanggal Lahir Ibu (Gambar 6). Pada User Interface Form Keluarga terdapat beberapa button, antara lain: *input data*, *delete data*, *clear*, *display data*, dan *search*.

No	Nama_ayah	Tempat_lahir_ayah	Tanggal_lahir_ayah	Nama_ibu	Tempat_lahir_ibu	Tanggal_lahir_ibu
1	Supriadi	Lamongan	12 Oktober 1977	Aeyah	Gresik	24 November 1980

Gambar 6. User Interface Menu Form Keluarga

6. User Interface Menu Form Golongan

Pada form golongan menampilkan beberapa kriteria input data untuk mengelola data golongan pangkat aparatur desa kendal, seperti Golongan Awal, Nama Pangkat, Tamat Golongan Awal, Golongan Akhir, Nama Pangkat, Tamat Golongan Akhir, MK Tahun, dan MK Bulan (Gambar 7). Pada User Interface Form Golongan terdapat beberapa button, antara lain: *input data*, *delete data*, *clear*, *display data*, dan *search*.

Gambar 7. User Interface Menu Form Golongan

7. User Interface Menu Form Riwayat Diklat

Tampilan Form Riwayat Diklat terdapat beberapa kriteria *input* data untuk mengelola data riwayat diklat aparatur Desa Kendal, antara lain: Jenis Diklat, Nama Diklat, Institusi Penyelenggara, Nomor Sertifikat, Tahun Diklat, Tanggal Mulai, Tanggal Selesai, dan Durasi (Jam) Diklat tersebut (Gambar 8). Pada *User Interface Form Riwayat Diklat* terdapat beberapa button, antara lain: *input data*, *delete data*, *clear*, *display data*, dan *search*.

Gambar 8. User Interface Menu Form Riwayat Diklat

8. User Interface Menu Form Riwayat Penghargaan

Tampilan *menu form* riwayat penghargaan terdapat beberapa kriteria input data untuk mengelola data riwayat penghargaan yang diperoleh aparatur Desa Kendal, seperti Jenis Penghargaan, Tahun Perolehan, Nomor Surat Keputusan, dan Tanggal Surat Keputusan (Gambar 9). Pada *User Interface Form Riwayat Penghargaan* terdapat beberapa *button*, antara lain: *input data*, *delete data*, *clear*, *display data*, dan *search*.

Gambar 9. User Interface Menu Form Riwayat Penghargaan

9. Hasil *Output Print* Dokumen pada aplikasi SIMPEG

Tampilan hasil *output print* pada setiap *menu form* Aplikasi SIMPEG (Gambar 10) dilakukan dengan cara menekan button pada setiap menu form yang tersedia di samping *button Search*.

Gambar 10. Hasil *Output Print* Dokumen pada aplikasi SIMPEG

Evaluasi *Prototype*

Evaluasi dilakukan dengan terlebih dahulu mengimplementasikan prototipe aplikasi SIMPEG pada tanggal 28 September 2021 di Kantor Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Kegiatan diawali dengan memberikan penjelasan mengenai *urgensi* aplikasi SIMPEG dalam mengelola data kepegawaian di tingkat desa. Selanjutnya menjelaskan alur penggunaan rancangan aplikasi SIMPEG sebagai inovasi layanan kepegawaian berbasis elektronik di kantor Desa Kendal.

Kegiatan pengujian (evaluasi) prototipe bertujuan untuk melihat keberhasilan prototipe aplikasi SIMPEG dengan mengukur bagaimana pemahaman para aparatur desa. Evaluasi terhadap pemahaman aparatur desa dilakukan dengan pengisian kuesioner. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa Aparatur desa yang bertugas sebagai pengelola informasi kepegawaian (Sekretaris Desa dibantu kepala urusan umum dan perencanaan) dapat menjalankan aplikasi SIMPEG dan memahami isian dari setiap menu pada yang ada di aplikasi SIMPEG. Selain itu, sebanyak 87,5% aparatur pemerintah desa dapat memahami isian dari setiap menu pada yang ada di aplikasi SIMPEG. Namun, pada *user interface*, belum ada *button upload* yang berfungsi mengupload berkas yang terkait dengan beberapa menu data kepegawaian, seperti: riwayat pendidikan, riwayat diklat, dan riwayat penghargaan.

Pemafaatan aplikasi SIMPEG ini merupakan perwujudan dari *Government to Employees* (G2E). *Government to Employees* (G2E) adalah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Tujuan hubungan ini adalah agar para pegawai pemerintahan (aparatur desa) dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari pegawai yang bekerja di kantor desa secara efektif dan efisien (Noviyanti et al., 2019). Pemanfaatan SIMPEG di kantor Desa Kendal sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Alfarraj dan Drew (2011) bentuk relasasi antara pemerintah dengan pegawainya dengan tujuan memberikan pelayanan kepada para pegawai secara elektronik.

Tersedianya aplikasi SIMPEG Desa ini membantu kepala desa untuk mengecek kembali data pegawai jika data pegawai dibutuhkan sewaktu-waktu oleh pemerintah daerah di atasnya. Selain itu, aplikasi ini juga sebagai panduan pengelolaan kepegawaian di tingkat desa, menambah pengetahuan, pemahaman dan keterampilan bagi aparatur pemerintah desa dalam menjalankan aplikasi SIMPEG, serta sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip *electronic government* (*e-government*) dan tertib administrasi kepegawaian. SIMPEG ini juga memudahkan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum untuk mendapatkan data pegawai yang diinginkan dan menganalisis data pegawai untuk melakukan strategi di masa mendatang guna mengembangkan potensi desa dengan optimal dan efisien -

di Kantor Desa Kendal.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemanfaatan aplikasi SIMPEG dalam pengelolaan kepegawaian di tingkat desa telah sejalan dengan SDGs Desa yang ke 17, yakni: kemitraan untuk pembangunan desa melalui kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa. Dengan adanya kemitraan, pembangunan berkelanjutan dapat terwujud dan berhasil dengan maksimal, yakni SDGs Desa 2030.

KESIMPULAN

Pengelolaan kepegawaian aparatur desa di Kantor Desa Kendal sejauh ini cukup baik, karena terdapat aparatur desa untuk melakukan pelayanan kepegawaian. Kegiatan administrasi kepegawaian berpengaruh pada keadaan data secara perorangan maupun secara keseluruhan. Pengelolaan kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG Desa dapat digunakan sebagai panduan manajemen kepegawaian desa, menambah pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan bagi aparatur pemerintah desa dalam menjalankan aplikasi SIMPEG, dan sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip *electronic government (e-government)* dan tertib administrasi kepegawaian. Ketersediaan aplikasi SIMPEG juga telah mewujudkan SDGs Desa yang ke 17 (kemitraan untuk pembangunan desa melalui kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi). Akan tetapi, perlu adanya *button upload* yang berfungsi mengupload berkas yang terkait dengan beberapa menu data kepegawaian, seperti: riwayat pendidikan, riwayat diklat, dan riwayat penghargaan. *Button upload* dapat digunakan sebagai arsip eletronik pada aplikasi ini yang menunjang informasi pada form-form riwayat pendidikan, riwayat diklat, dan riwayat penghargaan.

PENDANAAN

Publikasi artikel ini menggunakan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada civitas akademika Universitas Negeri Surabaya dan Pemerintah Desa Kendal, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan atas dukungannya sehingga artikel ini dapat di publish di Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.

REFERENCES

- Alfarraj, O., Drew, S., & Alghamdi, R. A. (2011). EGovernment Stage Model : Evaluating the Rate of Web Development Progress of Government Websites in Saudi Arabia. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 2(9), 82–90. eGovernment; Saudi Arabia government websites; web development progress; eGovernment stage model
- Djawa, M. K., & Puspasari, D. (2015). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Untuk Mendukung E-Government Pada Badan Kepegawaian Daerah (Bkd) Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Perkantoran*, 3(3), 1–15.
- Gupta, M. (2018). The innovation process from an idea to a final product: a review of the literature (online). *Int. J. Comparative Management*, 1(4), 400.
- Hasibuan, M. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Indrajit, R. E. (2016). *Konsep dan Strategi Electronic Government*. Andi
- Keputusan Kementrian Dalam Negeri nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
- Kim, S. (2008). Local Electronic Government Leadership and Innovation: South Korean Experience (online). *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 166–168.
- Noviyanti & Gamaputra, G. (2020). Model Pengembangan ADDIE dalam Penyusunan Buku Ajar Administrasi Keuangan Negara (Studi Kualitatif di Prodi D-III Administrasi Negara FISH Unesa). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 4(2), 100-120.
- Noviyanti, Rosdiana, W., Utami, D. A., & Anggraini, N. A. (2019). The Challenges of Civil Servant ' s Payroll Service in Local Government. *Advance in Social, Education and Humanities Research*, 383(Icss), 275–278.
- Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Rivai, V. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktek*. Raja Grafindo Persada.
- Sukamto, & Shalahuddin. (2015). *Analisa dan Desain Sistem Informasi*. Andi Offset.
- Suwarno, Y. (2013). *Inovasi di Sektor Publik (online)*. STIA LAN.
- Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Noviyanti, Prasetyo Isbandono, Dian Arlupi Utami, Haryo Kunto Wibisono, Weni Rosdiana. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.